

KEUSKUPAN JAYAPURA

Kotak Pos 1379, Jayapura 99013, Papua, Indonesia

☎ Kantor Uskup.(0967) 536411-533092, Rumah Uskup: 533277, Fax : (0967) 536427

No. : 073/2003/1.1.1
Perihal : Repatriasi Pelintas Batas

Jayapura, 7 Maret 2003

Kepada Yth.
Bpk. F.X. Suryanto
Kepala Bagian Perbatasan
Kantor Gubernur
Propinsi Papua
di
Jayapura

Dengan hormat,

Surat ini bersifat MEMO atas pembicaraan kita kemarin sekaligus sebagai penegasan atas sikap dan saran kami, setelah kami pagi ini menerima kopi Surat Dubes RI di Port Moresby dan Press Release Deplu di Jakarta.

Bpk. F.X. Suryanto menyampaikan rencana Pemerintah untuk memulangkan para pelintas batas yang ditampung di Vanimo, sekitar 15 Maret nanti. Tetapi karena masih ada keberatan dari LSM dan dari dua Uskup yang berada di wilayah perbatasan dengan Indonesia, maka kami diminta untuk ikut ke Vanimo agar bisa berbicara dengan Uskup Vanimo. Tujuannya ialah agar meyakinkan dia bahwa keamanan para pelintas batas dijamin. Mengenai sikap Uskup Vanimo itu, kami menyampaikan bahwa setahu kami dia tidak menghambat repatriasi orang-orang itu, tetapi dia tidak mendukung tindakan itu kalau orang-orang itu dipulangkan dengan paksa. Maka masalahnya terletak pada pihak Indonesia. Bagaimana Pemda, keamanan dan seluruh suasana masyarakat bisa meyakinkan orang-orang itu dengan sikap dan tindakan yang nyata bahwa mereka betul-betul hidup aman dengan masa depan yang cerah.

Sementara itu pagi tadi kami terima kopi surat Dubes dan Press Release Deplu. Bapak Dubes menyarankan agar kami ikut dalam tim Pemda Papua yang akan menjemput para pelintas batas. Peranan yang diharapkan dari kami sedikit lain. Bukan untuk berbicara dengan Uskup Vanimo untuk mencairkan keberatannya tetapi untuk berperan sebagai **mediator** dan mengedepankan **pendekatan persuasif**. Sedangkan Press Release Deplu mengemukakan tiga hal sebagai prasyarat repatriasi, yaitu mereka secara sukarela memilih untuk pulang ke daerah asalnya di Papua, Pemerintah Indonesia memfasilitasi pemulangan mereka dan juga menjamin keamanan mereka.

Peran yang diharapkan Bapak Dubes dari kami tidak dapat kami jalankan. Sebab kami tidak bisa membujuk mereka untuk pulang sementara kami sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk keamanan mereka.

Sedangkan apa yang dikatakan Deplu kami dukung, dan itu juga pendirian Uskup Vanimo serta Uskup lainnya yang pernah mengadakan pertemuan dengan Bapak dan orang Pemda lainnya, seperti dinyatakan dalam surat keempat Uskup kepada Bpk. Gubernur, 26 Februari 2001. Jelasnya ialah bahwa tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, tetapi mereka sendiri secara suka rela mau pulang, dan dijamin keamanannya oleh Pemda.

Maka ada dua hal yang kami mau kemukakan sebagai sikap dan saran:

1. Kami tidak perlu diikuti dalam tim Pemda untuk membujuk para pelintas batas. Kami akan mendengar dari Uskup Vanimo yang bisa berkomunikasi langsung dengan mereka untuk tahu berapa dan siapa yang dengan suka rela mau kembali. Kalau ada, maka kami dari Gereja-gereja akan turut memonitornya, seperti kami usulkan dalam surat 26 Februari 2001 tersebut di atas.
2. Dari pihak jaminan keamanan, kami menegaskan saran kami kemarin, yang juga kami anggap sebagai langkah pengkonkretan dari apa yang dikemukakan oleh Deplu. Saran itu ialah agar Bapak Gubernur Papua dan Bapak Kapolda Papua mengeluarkan satu pernyataan tertulis bahwa mereka yang kembali akan dijamin keamanannya. Itu berarti satu “**pemutihan**” bagi masa lalu mereka, dengan konsekuensi bahwa mereka tidak akan diinterogasi mengenai masa lalunya dan mengenai alasan pelariannya ke PNG. Pendek kata mereka harus bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya, dalam suasana yang leluasa seperti warga masyarakat lainnya. Jaminan semacam itu perlu, karena rupa-rupanya rasa takut dan terancam masih menghambat kesediaan mereka untuk kembali.

Demikian catatan kami dari pembicaraan kita kemarin dan penegasan sikap dan saran kami setelah kami terima informasi lebih lanjut dari pihak-pihak tersebut di atas. Atas pengertian Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Salam dan hormat,

Leo Laba Ladjar, OFM
Uskup Jayapura

Kopi:

- Gubernur Propinsi Papua
Bpk. Drs. J.P. Solossa, M.Si
- Kapolda Papua
Bpk. Drs. Budi Utomo
Inspektur Jenderal Polisi